

Serambi Indonesia : 15 Januari 2019

* Pupuk Subsidi di Kios Kosong

LHOKSEUMAWE - Pengurangan jatah subsidi pupuk di Aceh Utara serta langkanya pupuk bersubsidi di Aceh akhir-akhir ini dijadikan isu sentral oleh sejumlah mahasiswa untuk berunjuk rasa, Senin (14/1).

Mereka yang menyatakan dirinya bagian dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Eksekutif Wilayah (LMND-EW) Aceh berdemo di depan gerbang pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Belasan mahasiswa mulai menggelar aksi sekitar pukul 10.10 WIB. Mereka mengusung sejumlah poster dan baliho yang berisi teks singkat tentang isu kelangkaan maupun tentang pengurangan pupuk bersubsidi.

Para mahasiswa berorasi secara bergantian. Aksi yang berlangsung tertib itu mendapat pengawalan pihak kepolisian.

Sekitar pukul 11.30 WIB, perwakilan PT PIM dari bagian kehumasan dan pemasaran ke luar untuk menjumpai mahasiswa. Pihak PIM menjelaskan wewenangnya hanya sebatas pengadaan pupuk urea. Pengurangan kuota pupuk bersubsidi itu wewenang Menteri Pertanian RI. Seusai mendengarkan penjelasan pihak PIM, mahasiswa pun membubarkan diri secara tertib.

Koodinator Liputan LMND-EW) Aceh, Eri Ezi, menjelaskan, tahun 2018 kuota pupuk bersubsidi jatah untuk petani Aceh Utara mencapai 9.530 ton. Sedangkan pada tahun 2019, dikurangi kuotanya menjadi 7.000 ton. Selain itu, selama ini sering terjadi kelangkaan pupuk. "Jadi, kami menggelar aksi ini untuk mempertanyakan kedua hal tersebut," ujar Eri menjawab Serambi.

Manajer Humas PT PIM, Zulfan Efendi, menyatakan PIM mengapresiasi aksi mahasiswa yang mengangkat isu kelangkaan pupuk dan pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Namun, menurutnya, apa yang dipertanyakan para mahasiswa itu tergolong salah alamat. Seharusnya bukan ditanyakan ke pihak PT PIM.

"Soalnya, kami hanya bertugas menyediakan pupuk. Sedangkan masalah kuota, itu wewenang Menteri Pertanian yang ditindaklanjuti dengan keluarnya aturan dari dinas pertanian provinsi. Untuk kelangkaan pupuk, tanggung jawab pengawasannya juga bukan pada PT PIM, melainkan berada pada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida," demikian Zulfan Efendi.

Sementara itu dari Kota Langsa dilaporkan, wilayah kelangkaan pupuk subsidi di Aceh telah meluas ke berbagai kecamatan yang sedang melakukan tanam padi pada awal tahun ini.

Ketua Komisi II DPRA yang melakukan pemantauan ke wilayah pesisir timur Aceh, mulai dari Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur mendapati stok pupuk subsidi jenis ZA dan Ponska/NPK sudah habis di kios-kios pengecer.

“Dari hasil pantauan kami, wilayah kelangkaan pupuk subsidi sudah meluas,” lapor Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri ST, dari Kota Langsa kepada Serambi kemarin.

Pekan lalu, Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, juga mengecek ke kios-kios pengecer pupuk di Lambaro, Aceh Besar. Didapat informasi bahwa stok pupuk subsidi jenis ZA dan Ponska/NPK sudah habis sejak Desember 2018. Pupuk subsidi yang masih tersedia hanyalah urea. Itu pun stoknya tinggal sedikit lagi, antara 1-2 ton.

Di Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur, lanjut Nurzahri, pupuk subsidi sudah mulai langka. Pedagang pengecer pupuk subsidi melaporkan, pupuk langka karena sampai kemarin belum ada penandatanganan kontrak pembelian pupuk subsidi dari distributor penyalur pupuk subsidi kepada kios-kios pengecer di ibu kota kecamatan.

Kuota pupuk subsidi untuk 2019, menurut laporan petani kepada Nurzahri, sudah dibagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh pada akhir tahun 2018.

Kuota pupuk subsidi untuk Aceh tahun 2019, lanjut Nurzahri, menurut pedagang kios pengecer, telah menurun sejalan dengan hasil pemotretan areal sawah baku yang dilakukan BPN RI tahun 2018 melalui satelit. Terdeteksi, luas arealnya sudah berkurang.

Areal sawah baku produktif di Aceh berkurang 99.922 hektare (ha) dari 293.067 ha menjadi 193.146 ha. Akibat pengurangan sawah baku produktif itu, kuota pupuk subsidi untuk Aceh pada tahun 2019 ini pun ikut berkurang. Misalnya, kuota pupuk urea tahun lalu masih diberikan 80.687 ton, tahun ini turun menjadi 54.400 ton. Selanjutnya pupuk SP 36 dari 24.320 turun menjadi 16.668 ton, pupuk ZA dari 14.670 ton turun menjadi 9.247 ton, pupuk NPK dari 54.000 ton turun menjadi 35.249 ton, dan pupuk organik dari 8.950 ton menjadi 6.605 ton.

Pengurangan kuota pupuk subsidi itu, menurut pedagang pengecer pupuk, akan membuat stok dan kelangkaan pupuk subsidi di musim tanam rendeng dan gadu nanti makin panjang waktunya.

Kalau Pemerintah Aceh lambat menangani atau mengatasinya maka kelangkaan pupuk subsidi itu bakal berdampak kurang baik terhadap petani dan masyarakat secara umum.

Dampak tersebut, menurut Nurzahri, antara lain, pemupukan tanaman padi akan berkurang dan produktivitas gabah tahun ini pun tidak sebanyak tahun lalu atau menurun. Harga gabah pada waktu panen pun akan tinggi dan penghasilan yang diterima petani tidak sebanyak tahun lalu lantaran produksi gabahnya tidak sebanyak tahun lalu. “Inilah efek domino dari kelangkaan pupuk subsidi itu,” kata Nurzahri.

Kelangkaan pupuk subsidi ini, menurut Nurzahri, harus secepatnya ditangani Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama disperindag kabupaten/kota yang berfungsi mengawasi distribusi pupuk subsidi bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan kabupaten/kota serta lembaga teknis lainnya.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Muhammad Raudhi MSi yang dimintai tanggapannya terkait kelangkaan pupuk subsidi itu mengatakan, di beberapa wilayah kecamatan di berbagai kabupaten/kota memang sudah ada yang menanam padi dan saat ini petani butuh pupuk subsidi.

Kuota pupuk subsidi tahun 2019, kata Raudhi, memang sudah dibagi ke kabupaten/kota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distanbun Aceh. Tapi sebelum dilakukan penandatanganan kontrak penjualan pupuk subsidi tahun 2019 kepada kios pengecer, terlebih dahulu harus dilakukan rapat koordinasi antara Disperindag dan Disntabun Aceh bersama kabupaten/kota dengan produsen dan distributor pupuknya.

Rakor itu, menurut Raudhi, bertujuan untuk membagi kembali kuota penyaluran kepada distributor pupuk yang ada di daerah masing-masing karena jumlah kuota pupuk tahun ini menurun 30 persen lebih dari kuota tahun lalu.

Setelah pembagian kuota per distributor dan wilayah penyaluran baru dilakukan penandatanganan kontrak penjualan pupuk antara distributor dengan pedagang kios pengecer pupuk subsidi. Biasanya ini dilakukan di ibu kota kabupaten/kota atau di kecamatan. “Rapat koordinasi distribusi pupuknya telah kita rencanakan dilakukan Rabu atau Kamis depan di Kantor Disperindag Aceh.”

Raudhi juga memahami mengapa petani mendesak Pemerintah Aceh segera menyalurkan pupuk subsidi tahun 2019. Alasannya, karena pupuk nonsubsidi sangat mahal harganya, apalagi sekarang ini kuota pupuk subsidi sudah berkurang dibanding tahun lalu.

Misalnya, harga pupuk urea bersubsidi Rp 1.800/kg atau Rp 90.000/sak (isi 50 kg), pupuk urea nonsubsidi di atas Rp 150.000/sak. Begitu juga harga pupuk subsidi jenis lainnya, seperti SP36, ZA, Ponska/NKP, dan organik, harganya jauh di atas harga pupuk subsidi. “Makanya petani minta agar pemerintah segera mengatasinya,” demikian Raudhi. (bah/her)

<http://aceh.tribunnews.com/2019/01/15/kuota-pupuk-dikurangi-mahasiswa-demo-pt-pim?page=3>